



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 823/VII/2014

1/JULI 2014



## **Buton Berpotensi Menjadi Kawasan Pariwisata Khusus**

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu pertama bulan Juli 2014 diisi dengan Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2013 pada Rapat Paripurna, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Keterangan Pemerintah mengenai pokok-pokok RUU Pertanggungjawaban atas APBN TA 2013

Untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan Pasal 34 ayat (6) UU Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2013, maka diajukanlah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2013. Pemerintah mengakui bahwa dalam tahun 2013, perekonomian nasional dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup berat. Dari sisi eksternal, perekonomian nasional dihadapkan pada kondisi perlambatan kinerja perekonomian global, kecenderungan penurunan harga komoditas internasional serta gejolak di pasar keuangan akibat isu rencana kebijakan tapering off atau pengurangan stimulus moneter oleh Bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Dari sisi internal, kondisi neraca transaksi berjalan mengalami tekanan cukup signifikan akibat kurang kondusifnya kondisi eksternal tersebut. Akibatnya, tekanan nilai tukar Rupiah juga tak terhindarkan selain juga karena sentimen negatif akibat isu rencana kebijakan tapering off di Amerika Serikat yang mengakibatkan meningkatnya aliran modal ke luar (capital outflow).

Dalam upaya merespon gejolak eksternal tersebut, Pemerintah bersama otoritas terkait telah mengambil langkah stabilisasi, seperti penguatan neraca transaksi berjalan, stabilisasi nilai tukar Rupiah serta penyesuaian harga BBM bersubsidi. Langkah-langkah tersebut harus



diakui juga mengandung sejumlah konsekuensi dalam jangka pendek, seperti naiknya tekanan inflasi akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi serta melambatnya aktivitas ekonomi. Namun demikian, dalam jangka panjang langkah-langkah tersebut akan memberikan fondasi yang solid bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dinamika eksternal dan internal perekonomian nasional tersebut tentu saja akan berdampak pada pencapaian asumsi-asumsi dasar makro ekonomi yang pada gilirannya juga mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian target-target APBN TA 2013. Di tengah kondisi ekonomi global yang kurang kondusif tersebut, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,78 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,26 persen. Perlambatan

ini terutama disebabkan oleh belum cukup kuatnya kinerja ekspor akibat perlambatan kinerja pertumbuhan global, khususnya negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India, serta masih lemahnya harga komoditas global.

## RUU tentang Pembentukan Sejumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembentukan Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, po-

tensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Muna dan Buton, maka perlu diadakan pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton Tengah dan Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan tiga kabupaten ini juga adalah untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Buton juga Muna pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### RDP Komisi II DPR RI

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI ini mengagendakan dua acara, yaitu : (1) Membahas evaluasi pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan (2) Membahas persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu beserta anggota dan jajarannya, dipimpin oleh Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP,M.Si selaku Ketua Komisi II DPR RI. Sejumlah pokok penjelasan disampaikan oleh Ketua KPU, diantaranya: (a) Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilpres dan Wapres tahun 2014, (b) Dana Kampanye Pilpres dan Wapres tahun 2014, (c) Persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pilpres dan Wapres 2014 dan (d) Penetapan pasangan capres dan cawapres terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Selain Ketua KPU, sejumlah pokok penjelasan juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu diantaranya: (a) Pengawasan kampanye Pilpres dan Wapres tahun 2014 terdapat upaya pencegahan dan penindakan melalui proses penanganan pelanggaran, yakni; (1.) Standardisasi pengawasan kampanye dan (2.) Penanganan pelanggaran kampanye. Selama pelaksanaan kampanye, Bawaslu RI (pusat) telah menerima 32 laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu, terdiri dari 3 temuan Bawaslu dan 29 laporan. Untuk 25 laporan/temuan telah dilakukan pengkajian hukum dan rekomendasi oleh Bawaslu. Pada point (b), persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pilpres dan Wapres 2014 yang terdiri dari; (1) persiapan pengawasan, (2) persiapan penanganan pelanggaran dan (3) strategi penanganan pelanggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Kesimpulan rapat Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu menghasilkan lima point penting, yaitu; (1) Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk memanggil tim sukses pasangan capres guna mengoptimalkan masa kampanye yang akan berakhir pada 5 Juli 2014 dengan mengedepankan kampanye damai yang saling menghargai dan menghormati dalam rangka membangun Indonesia untuk semua. (2) Terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara pada hari pemungutan suara, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk memperhatikan pengamanan penggunaan logistik serta rekapitulasinya agar berjalan dengan aman dan tertib. (3) Terhadap para petugas di lapangan, dan di semua tingkatan penyelenggara, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk segera mengambil tindakan melalui penandatangan suatu fakta integritas yaitu tidak akan menerima barang maupun uang dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. (4) Terhadap pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu mengawasi seluruh kegiatan kampanye baik yang dilakukan KPU maupun yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan mengambil tindakan

tegas baik kepada KPU maupun pasangan capres cawapres serta memberikan sanksi yang tegas terhadap aparat pengawas terutama pengawas lapangan yang terindikasi menerima suap. (5) Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu untuk melakukan koordinasi dalam rangka penyamaan sikap dengan Polri mulai dari tingkat pusat sampai ke desa dalam melakukan pengawasan dan mengamankan pelaksanaan Pilpres dan Wapres 2014, dengan mengoptimalkan dan memfungsikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk penegakan hukum Pemilu.

*Pimpinan Komisi II DPR RI berdialog dengan Pimpinan KPU dan Bawaslu*



# Buton Berpotensi Menjadi Kawasan Pariwisata Khusus



Tim kunjungan Spesifik Komisi X DPR didampingi Bupati Buton dan Walikota Baubau melihat batu Popaua

Pulau Buton, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara berpotensi menjadi Kawasan Pariwisata Khusus. Hal ini dikatakan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Agus Hermanto, saat melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Buton dan Kota Baubau. Ketua Komisi X ini menilai, Buton memiliki keunikan yang tidak ada di tempat lain. Bahkan, bisa jadi keunikan ini hanya ada di Buton.

“Buton ini memiliki keunikan, yaitu tata pemerintahan yudikatif, eksekutif dan legislatif yang ada sejak zaman kesultanan. Bahkan, dulu Buton juga telah menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, potensi wisata alam yang sangat indah, seperti pantai dan goa. Buton juga memiliki Benteng Keraton yang terluas di dunia,” jelas Agus, usai meninjau beberapa lokasi wisata di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, minggu lalu.

Politisi Demokrat ini juga melihat

aspek lain yang turut mendukung ekonomi Buton, yaitu produksi aspalnya yang memiliki kualitas terbaik. Menurutnya, jika aspal ini dikembangkan dengan baik, dan memiliki kualitas dunia, hal ini dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan daerah.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR Oelfah Syahrullah Harmanto. Ia mengaku kagum dengan potensi wisata di Pulau Buton. Bahkan, Politisi Partai Golkar ini sampai menyebut pulau ini sebagai kepingan surga yang jatuh ke bumi. Apa pasal? Ia menilai pulau yang bertetangga dengan Pulau Muna ini, sangatlah indah

“Pulau ini sangat indah. Saya apresiasi juga usaha Bupati Buton dalam mengembangkan potensi di daerahnya. Pantai Katembe juga bagus. Pemandangan dari Benteng Keraton Buton pun sangat indah. Namun, ketika Buton menjadi kawasan wisata, kami mohon biaya akomodasi jangan

terlalu mahal, sehingga nanti banyak wisatawan yang datang ke sini,” harap Oelfah.

Dalam sesi pertemuan, Bupati Buton Umar Samiun mengatakan bahwa Buton memang memiliki banyak potensi wisata. Bahkan, beberapa daerah memiliki keunikan tersendiri, yang bahkan mungkin tidak ada di tempat lain.

“Seperti di Pantai Nirwana, pasirnya memiliki karakter yang berbeda. Pasirnya tidak lengket di kulit, sehingga jika bermain pasir di pantai ini, sesudahnya tidak perlu dibasuh air, maka pasirnya akan rontok sendiri. Selain itu kita memiliki Pantai Katembe yang memiliki garis pantai sepanjang 2,8 kilometer,” jelas Umar.

Umar juga menjelaskan beberapa potensi wisata lain yang dimiliki Buton, seperti Benteng Keraton Buton, masjid tertua di Buton, Goa Langalu, dan Pulau Batu Atas yang memiliki potensi

wisata bawah laut yang menakjubkan.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Baubau AS Tamrin berharap, kunjungan Komisi X ke Buton ini dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana Pulau Buton. Pasalnya, APBD Buton yang masih terbatas. Ia mengakui, masih banyak potensi wisata Buton yang belum tergali.

“Masih banyak potensi lain yang belum tergali. Akan terus kami gali dan revitalisasi, sehingga pariwisata Buton semakin menonjol, sehingga ini membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai promosi, dan mengharapkan partisipasi dari investor,” jelas Tamrin.

#### Perlu Kerjasama Kementerian Terkait

Untuk mengembangkan potensi

wisata Buton ini perlu mendapat perhatian khusus, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Anggota Komisi X Rinto Subekti menilai perlu ada sinergi antar Kementerian untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah.

“Perlu ada sinergi antar kementerian di pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi wisata di daerah. Seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas Rinto.

Dalam hal ini, tambah Politisi Demokrat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dapat menunjang pembangunan infrastruktur di Buton. Apalagi, Buton terkenal dengan produksi aspalnya, sehingga seharusnya jalan raya di Buton harus memiliki kualitas yang baik pula. Sedangkan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan

dan Perikanan berperan dalam perizinan wisata yang menjadi area kerja kedua kementerian tersebut.

Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Pulau Buton dalam rangka menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-undang Kawasan Pariwisata Khusus (Kaparsus). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai mitra dari Komisi X mengusulkan bahwa Pulau Buton memiliki banyak pariwisata yang lebih spesifik dan khusus yang bisa dijadikan acuan dalam RUU.

Agus menyatakan, dengan adanya RUU ini nantinya dapat mengembangkan potensi pariwisata di daerah, sehingga dapat menghasilkan devisa, dan memperkenalkan pariwisata itu ke mata dunia. Sehingga, diharapkan kedepannya Buton bukan hanya mengandalkan aspal sebagai sumber pendapatan daerah, namun juga potensi wisatanya. (sf)

## Paripurna Setujui RUU Sisbuk Menjadi RUU Inisiatif DPR

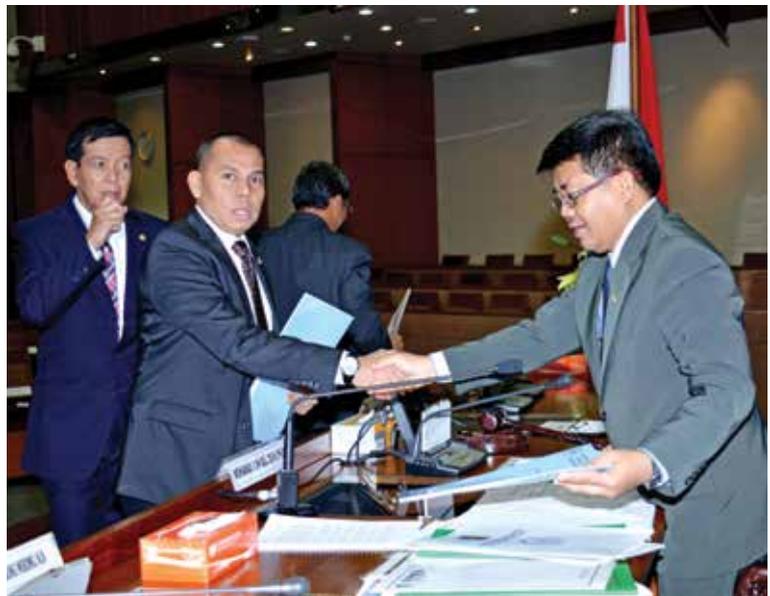
Sidang Paripurna menyetujui Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi X DPR RI tentang Sistem Perbukuan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Persetujuan ini didapatkan usai seluruh fraksi di DPR menyerahkan pandangan fraksinya kepada pimpinan sidang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman selaku pimpinan sidang menawarkan agar pandangan fraksi dibacakan, namun disepakati pandangan fraksi cukup diserahkan saja oleh masing-masing perwakilan fraksi.

“Delapan fraksi sudah menyampaikan, ada satu fraksi yang karena kesalahan teknis nanti akan menyusul. Untuk itu saya akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Komisi X tentang Sistem Perbukuan, dapat disahkan menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Sohibul, di Gedung Nusantara II, Kamis (3/7)

Jawaban ‘setuju’ secara serentak pun diucapkan oleh seluruh anggota dewan yang hadir. “Selanjutnya persetujuan rapat RUU hari ini akan disetujui sesuai mekanisme yang berlaku,” tutup Politisi PKS ini mengakhiri rapat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Panja RUU Sisbuk Utut Adiando menyatakan, dengan adanya RUU Sis-



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menerima Pandangan Fraksi Partai Demokrat

buk ini diharapkan dapat menekan harga buku, baik buku pendidikan maupun buku umum, sehingga dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, RUU ini juga dapat memberikan perlindungan hak cipta dan royalti bagi para penulis. (sf)foto: Naefuroji/parle/hr.

# DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2013

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2013. Semua fraksi menyatakan setuju atas RUU ini yang pada 24 Juni lalu pernah disampaikan pemerintah di DPR. Catatan kritis disampaikan pula para juru bicara fraksi dalam agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU itu.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman, Kamis (3/7), hanya mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPR. Hadir dalam rapat tersebut Menkeu Chatib Basri selaku wakil pemerintah. Atas pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN 2013 oleh pemerintah tersebut, BPK telah memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Catatan kritis Fraksi Hanura misalnya yang dibacakan Murady Darmansjah, menyatakan sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat masih lemah sehingga berpotensi mendorong kerugian keuangan negara. Pemerintah diimbau melakukan perbaikan sistem pengendalian internal keuangan pemerintah melalui satu peningkatan sumber daya manusia dengan sistem terarah.

Sementara itu, F-PAN mengapresiasi kerja pemerintah atas upaya mendapatkan predikat opini WDP. Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 yang disampaikan beberapa waktu lalu, merupakan cerimanan dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pemerintah diharapkan tetap memiliki antisipasi yang baik dalam melakukan perencanaan yang tepat dan membuat kebijakan yang efektif terhadap perkembangan perekonomian



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman

global. Potensi terganggunya target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam APBNP 2014 bisa saja terjadi.

F-PAN mendesak pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap penyelesaian pengolahan piutang bukan pajak, yaitu tagihan *overleading* sebesar Rp 7,18 triliun, penjualan migas sebesar Rp 3,86 triliun, aset kredit BPPN sebesar Rp 66,01 triliun, dan saldo dana belanja pensiun pada mitra bayar PT. Taspen sebesar Rp 3002,06 milyar. (mh)foto: Iwan Armanias/parle/hr

## Penyelesaian RUU Tapera Molor Lagi

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang rencananya diselesaikan pada Masa Sidang IV tahun 2013/2014, akan molor lagi. Berdasarkan informasi dari Menpera, dalam menengahi masalah pengelolaan dana tapera antara Kemenpera dan Kemenkeu, pemerintah akan mencari konsultan independen.

“Baru kali ini saya menjadi anggota Dewan dalam membahas RUU, Pemerintah tidak PD (percaya diri). Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil resiko,” tandas Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi kepada Parle di Jakarta, Kamis (3/7).

Yoseph mengatakan, dengan sikap



Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi

itu pemerintah berarti tidak terlalu perhatian terhadap penyediaan rumah

bagi golongan yang tidak mampu. “Terus terang saya kecewa, karena itu saya mendesak pemerintah untuk menunjukkan kemauan politik yang baik untuk menyelesaikan perumahan. Makin lama pasti akan bertambah dan persoalannya akan makin berat,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Karena itu, sambung dia, pada hari Senin mendatang, Pansus akan mengundang Kemenpera untuk melakukan rapat kerja juga dengan Menkeu. “Menkeu kita undang, tetapi selama ini belum pernah hadir,” ujarnya.

Terhambatnya niat baik Dewan untuk memperjuangkan rumah murah bagi masyarakat, kata Yoseph ternyata



belum bisa dilakukan. DPR sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin agar RUU Tapera ini bisa segera selesai, namun ternyata hambatannya bukan di DPR tetapi justru oleh pemerintah. Padahal tujuannya membantu pemerintah untuk membuat payung hukum untuk memobilisasi dana.

Ditambahkan, persoalan pembanguan rumah tergantung dana, kalau hanya mengandalkan APBN sangat sedikit sebab hanya dialokasikan 4%. Karena itu harus mencari dana, bukan dari luar negeri tetapi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan UU Tapera dimaksudkan untuk memobilisasi dana dari seluruh masyarakat supaya dananya makin besar, kalau dikelola hasilnya cukup besar yang akhirnya bisa untuk membangun rumah bagi masyarakat tidak mampu. (mp) foto:naefuroji/parle/hr

## Transaksi Rupiah di Pelabuhan Mestinya Diterapkan Sejak Dulu

Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung soal penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di pelabuhan, mestinya sudah diterapkan sejak dulu seiring lahirnya UU No.7/2011 tentang Mata Uang.

Komisi VI DPR RI dalam kesempatan rapat dengan pemerintah beberapa tahun lalu, sudah mengingat hal ini. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Ferrari Roemawi (FPD) sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Kamis (3/7). Bahkan, mestinya tidak hanya di pelabuhan, penggunaan rupiah harus digunakan di seluruh wilayah negara RI dalam bertransaksi. Sebelumnya, transaksi di pelabuhan menggunakan mata uang dolar.

“Mestinya dilaksanakan dari dulu, karena sudah ada UU mata uang yang

mengharuskan transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah. Jadi, sebetulnya tidak hanya di pelabuhan, transaksi apa pun di wilayah negara RI harus menggunakan mata uang rupiah,” kata Ferrari. Penggunaan rupiah diharapkan tidak menekan lagi terhadap kurs kita.

Tak hanya menguatkan rupiah, kebutuhan terhadap dolar pun berkurang dengan keluarnya keputusan Menko Perekonomian tersebut. Di beberapa negara penggunaan mata uang sendiri dalam setiap transaksi di pelabuhan sudah lama diterapkan. Indonesia termasuk telat menerapkan kebijakan ini.

Para pengusaha Indonesia sebelum keluar keputusan Menko Perekonomian selalu menggunakan mata uang dolar dalam bertransaksi di pelabu-



Anggota Komisi VI DPR Ferrari Roemawi

han, karena ada peraturan Menteri Perhubungan No.6/2013 yang masih mengharuskan penggunaan dolar. (mh) foto:iwan armanias/parle/hr

## Komisi VIII Terima Sejumlah Catatan dari Baleg

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa selaku pengusul RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah menerima catatan-catatan yang diberikan anggota Baleg dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas laporan Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjapan Konsep RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, Rabu (2/7).

“Kami menerima sejumlah catatan-catatan yang disampaikan anggota Baleg terhadap RUU, meski sebenarnya ada beberapa yang memang sudah masuk dalam draft RUU tersebut,” ujar Ledia.



Anggota Panja RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR dalam rapat pleno Baleg

Dicontohkannya, ada catatan dari beberapa anggota Baleg yang menginginkan adanya Majelis Amanah Haji sebagai dewan pengawas pengelolaan ibadah haji. Mengenai hal tersebut Ledia mengungkapkan bahwa dalam UU ini juga membedakan secara tegas siapa yang bertindak sebagai regulator atau pembentuk kebijakan mengenai haji, siapa yang melaksanakan penyelenggaraan atau pengelolaan haji, dan siapa yang bertindak sebagai pengawas.

“Dalam RUU ini Panja sepakat memposisikan Menteri Agama sebagai regulator, sementara pelaksana penyelenggaraan haji regular dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut BPHI (Badan Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia), dan Majelis Amanah Haji sebagai Pengawas. Sementara haji khusus dan umrah dilaksanakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” papar Politisi dari Fraksi PKS ini.

Ditambahkannya, UU ini juga mengatur mengenai aset haji, pengelolaan dan evaluasi pengelolaan aset haji yang amanah bagi kemanfaatan Jamaah Haji dan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Panja juga merekomendasikan agar UU ini dibahas paralel dengan UU Keuangan Haji, bahkan apabila memungkinkan, maka sebaiknya disatukan dalam satu UU saja,” jelasnya. (Ayu) foto: rizka/parle

## DPR Serukan Pilpres Damai

Pemilu presiden (pilpres) yang segera dihelat pada 9 Juli 2014 diharapkan penuh kedamaian dan tanpa kecurangan. Belajar dari pemilu legislatif kemarin di mana kecurangan sangat masif terjadi, maka pilpres harus terjaga kualitasnya. Pilpres kali ini diharapkan lebih berperadaban.

Seruan pilpres damai disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Ali kepada delegasi pimpinan DPRD seluruh Indonesia di DPR, Rabu (2/7). Pertemuan pimpinan DPRD dengan Ketua DPR RI merupakan hasil kerja sama dengan *Central for Election and Political Party (CEPP)*, Universitas Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), Husnul Mariyah Presiden Direktur CEPP, dan para delegasi CEPP dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Seruan pilpres damai penting disampaikan kepada para pimpinan DPRD, karena mereka memiliki otoritas untuk berbicara kepada rakyat pemilihnya di daerah. Agenda pertemuan tersebut memang menyiapkan pemilu damai, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai amanat konstitusi Bab VII B, pasal 22 E.

Marzuki menghimbau agar pelaksanaan pilpres di daerah berjalan lancar tanpa ada gesekan konflik apa pun. “Kita tidak ingin Indonesia menjadi Thailand dan Mesir yang ketika demokrasinya tumbuh malah menjadi hancur,” tutur Marzuki. Setiap kontestan pemilu harus tampil lebih dewasa menghadapi demokrasi. Dalam pentas pemilu yang demokratis selalu ada pihak yang kalah dan menang. Semua pi-



Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan Pimpinan DPRD seluruh Indonesia

hak dihimbau mau menerima kekalahan.

Seperti diketahui, pilpres kali ini hanya diikuti dua pasang calon yang secara diametral sangat rentan gesekan. Untuk itu para elit politik di pusat maupun daerah dihimbau menjaga kedamaian selama kampanye dan pemungutan suara. “Elit yang tidak siap menerima kekalahan dalam berdemokrasi, ini sangat berbahaya karena bisa menyulut konflik di masyarakat,” kata Marzuki.

CEPP dalam siaran persnya menyatakan, kontestasi dua kubu capres dan cawapres memiliki potensi konflik. Ini terlihat dari maraknya kampanye hitam dan kampanye negatif dari para

pendukung masing-masing capres. Untuk itu, DPR dan DPRD seluruh Indonesia bersama-sama dengan CEPP di 33 provinsi memiliki kewajiban moral untuk mengawasi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pilpres 2014.

Marzuki menambahkan, siapa pun yang terpilih pada 9 Juli nanti, itulah presiden kita bersama yang harus diterima semua pihak. Tanggal 9 Juli itu, sambung Marzuki, bukan segala-galanya. Jadi harus disikapi dengan wajar, betapa pun kemenangan yang diraih pasangan capres dan cawapres tertentu kemungkinan diraih dengan selisih yang sangat tipis. (mh) foto: nae-furodjie/parle

## Baleg Setujui Laporan Panja RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh

Badan Legislasi DPR RI akhirnya menyetujui RUU Tentang Pengelolaan Ibadah haji dan Umrah yang menjadi usulan dari Komisi VIII DPR RI. Hal tersebut diputuskan dalam rapat Pleno Baleg, Rabu (2/7) di ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan Jakarta.

“UU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah ini merupakan UU pengganti atas UU NO.13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kami melihat dalam UU no.13 ini mengatur terlalu banyak tentang Kemenag atas berbagai hal, mulai dari regulator, pelaksana sekaligus pengawas. Ini yang ingin diurai agar kewenangan tidak terlalu besar sehingga Kemenag hanya fokus pada pembinaan ahlak masyarakat dan pendidikan masyarakat. Ini diatur agar lebih jelas dan lebih konkret tugas dan wewenang Kemenag,” jelas Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi PKB ini, dengan adanya pengaturan dari wewenang Kemenag dalam Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah tersebut diharapkan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah dapat berlangsung secara profesional, akuntabel dan transparan. Dengan demikian tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolannya yang akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik pada instansi tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII, Mahrus Munir sebagai bagian dari pengusul RUU tentang pengelolaan ibadah haji dan umrah itu bersyukur dan mengapresiasi para anggota Baleg yang menyetujui pembahasan RUU tersebut lebih lanjut lagi. Pasalnya menurut Politisi Partai Demokrat ini sudah hampir dua tahun RUU ini diusulkan ke Baleg, namun baru disetujui Rabu (2/6) ini.

“Kami bersyukur sekaligus mengapresiasi para anggota

Baleg yang menerima atau menyetujui Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah ini untuk dibahas ketingkat yang lebih lanjut lagi. RUU ini sudah hampir dua tahun kami usulkan ke Baleg, tapi baru sekarang disetujui. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bersama teman-teman semua kami dapat menyelesaikan RUU ini,” papar Mahrus Munir.



Pimpinan Komisi VIII dan Pimpinan Baleg DPR menandatangani RUU Tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah

Mahrus mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji selama ini menjadi sorotan masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan UU yang akan mengatur penyelenggaraan haji secara lebih komprehensif dan profesional, yakni dengan mengatur sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan umat terhadap pihak penyelenggara. (Ayu) foto: rizka/parle

## Pengelolaan Blok Kampar Harus Didukung Fasilitas dan SDM Handal

Anggota Komisi VII DPR Sutan Sukarnotomo mengatakan, masyarakat Pelalawan berharap agar dapat mengelola Blok Kampar namun apabila hanya melibatkan BUMD tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. “Pembahasan lanjutan akan dilaksanakan di Jakarta, namun waktunya belum bisa dipastikan. Komisi VII akan berperan mencari waktu yang tepat pertemuan antara Pemkab Pelalawan bersama Kementerian ESDM,” katanya se usai pertemuan

dengan Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, di Auditorium Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau baru-baru ini.

Menurutnya, harapan masyarakat Pelalawan agar dapat mengelola Blok Kampar sangat memungkinkan namun harus didukung oleh sarana dan fasilitas serta SDM yang handal di bidang Migas. “Itu memang masih kurang di Pelalawan, sehingga membutuhkan dukungan pihak luar agar

hasilnya lebih baik,” ungkapnya.

Menurutnya, tuntutan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar yang diwakili Tengku Zulmizan F Asegaf yang berkeinginan untuk merebut Blok Kampar dengan harga mati tidak seharusnya pernyataan itu dikeluarkan.

Dia menambahkan, idealnya Pemkab Pelalawan menawarkan kerja sama dalam bentuk Badan Operasi Bersama



(BOB). “Yang menjadi kekhawatiran pusat tidak lain, adalah soal kesiapan. Jika tidak, maka otomatis berdampak pada menurunnya hasil produksi nasional,” paparnya.

Sebelumnya antara sejumlah anggota Komisi VII DPR RI telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah kabupaten Pelalawan, Forum Masyarakat Pelalawan, SKK Migas, PT Medco (pengelola Blok Kampar) dan juga Pemprov Riau. *(Sugeng Irianto)*

Anggota Komisi VII DPR Sutan Sukarnotomo

## Mendesak, Pengaturan Tanah dan Air



Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono berjabat tangan dengan Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo

Tanah dan air merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara. Perlu ada pengaturan tersendiri tentang pemanfaatan tanah dan air dari kerusakan dan eksploitasi berlebihan. Selama ini pengaturan tentang konservasi tanah dan air belum memadai dan komprehensif.

Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas RUU Konservasi Tanah dan Air (KTA) dengan Komisi IV DPR sebagai pengusul, Selasa (1/7). Ignatius Mulyono Ketua Baleg yang memimpin rapat tersebut, berharap agar semua anggota Baleg bekerja keras dan cepat untuk melakukan harmonisasi atas RUU KTA ini.

Hadir dalam rapat tersebut Herman Khaeron Wakil Ketua

Komisi IV yang memaparkan substansi RUU KTA bersama beberapa anggota Komisi IV lainnya. Tanah sebagai sumber daya perlu dimanfaatkan secara optimal, sambil diimbangi dengan perlindungannya untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Di sinilah pentingnya mengatur pemanfaatan tanah sekaligus air yang dikandungnya dalam sebuah undang-undang. RUU ini sudah sangat mendesak.

“Konservasi tanah dan air dilakukan untuk melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara tanah dari kerusakan. Pengaturan mengenai konservasi tanah dan air saat ini masih belum memadai dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif, oleh karenanya diperlukan pengaturan tersendiri dalam bentuk undang-undang,” ungkap Herman di hadapan rapat Baleg.

Secara tradisional, kata Herman, tanah berfungsi sebagai media tumbuh tanaman untuk kegiatan pertanian. Namun, saat ini fungsi tanah lebih luas lagi, antara lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk menghadapi perubahan iklim. “Untuk itu, tanah harus dikelola untuk meningkatkan ketersediaan produk pertanian, menyaring udara, memurnikan air, dan untuk mengurangi peningkatan emisi karbon karena aktivitas manusia,” papar Herman.

Setelah pemaparan substansi RUU KTA, para anggota Baleg secara bergantian bertanya tentang substansi yang dirumuskan untuk mendapatkan persamaan persepsi atas RUU yang sedang dibahas. Setelah melewati pembahasan di Baleg, RUU ini diharapkan dapat disetujui di Rapat Paripurna DPR sebagai usul inisiatif DPR. Selanjutnya, sebelum masa bakti DPR periode 2009-2014 berakhir, RUU KTA sudah disahkan menjadi undang-undang. *(mh)*

*foto:naefuroji/parle/hr*

# Sekjen DPR Apresiasi Penyelenggaraan Bazar

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti mengapresiasi penyelenggaraan bazar yang diselenggarakan di Lobi Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen. Bazar ini dilaksanakan dalam rangka memasuki bulan Ramadhan dan menyambut Idul Fitri 1355 Hijriyah, berlangsung dari Rabu sampai Jumat, 2-4 Juli 2014.

“Saya memberikan apresiasi dan menyambut dengan baik penyelenggaraan bazar ini dari tahun ke tahun. Dengan bazar ini kita semua berharap membawa manfaat baik peserta atau konsumen, pembeli di lingkungan DPR, MPR, dan DPD ini,” kata Winantuningtyastiti dalam sambutannya, Rabu (2/07).

Win, sapaan akrab Winantuningtyastiti menyatakan, dengan adanya bazar ini dapat memberikan semangat di bulan Ramadhan ini. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya UKM yang berada di DPR, MPR, dan DPD.

“Dengan adanya bazar ini juga untuk membangun komunikasi para pelaku usaha, memperluas pasar, serta mendekatkan pasar dengan kebutuhan, dalam hal ini adalah seluruh pegawai. Dan yang paling penting adalah perwujudan tanggung jawab Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Dharma Wanita, dan Koperasi Setjen DPR untuk ikut serta membina UKM,” tambah Win.

Ia juga berharap kepada peserta bazar, agar kesempatan ini bisa digunakan untuk terus melakukan kreatifitas, inovasi-inovasi, dan meningkatkan kualitas dari produk-produk yang dihasilkan sehingga bisa bersaing, tidak hanya di Indonesia, namun juga bersaing dengan produk negara lain.

“Kita ingat bahwa tahun depan adalah pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC), dimana sangat terbuka pasar barang dan jasa persaingan termasuk sumber daya manusia dan ini harus kita hadapi bersama. Jadi mudah-mudahan kesempatan ini bisa mendorong semangat para pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan juga memperluas



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti membuka Bazar di bulan Ramadhan pasar,” jelas Win.

Dalam kesempatan ini ia juga berharap, ada peningkatan transaksi, karena jumlah stand bazar yang meningkat, hingga 95 peserta. Namun, ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tetap kontrol dalam berbelanja.

“Dengan banyaknya peserta bazar ini memang mendorong konsumen untuk membeli barang, tapi harus diingat jangan boros, karena kebutuhan untuk Idul Fitri hingga Natal masih harus dipenuhi. Membeli barang yang memang dibutuhkan, selektif, agar *supply and demand* seimbang,” pesan Win.

Usai memberikan sambutan, Win memukul gong sebagai peresmian pembukaan bazar, dengan didampingi Wakil Sekjen DPR RI, Ketua Korpri Setjen DPR RI, Ketua Darma Wanita Setjen DPR RI, dan Ketua Koperasi Setjen DPR RI.

Acara dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada 20 pegawai *outsourcing*, dan penyerahan secara simbolik diwakili oleh 3 pegawai, yaitu Diah Nuryati, Muhammad, dan Agus Iwan. Acara diakhiri dengan peninjauan langsung stand bazar oleh Sekjen DPR dan jajaran. (sf,pi)/foto:odjie/parle/iw.

## Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Turki Segera dibawa ke Paripurna

Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya menyetujui RUU tentang kerja sama Industri Pertahanan Indonesia dan Republik Turki untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin saat memimpin Raker dengan Menlu, Menhan dan Menkum dan HAM di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin (30/6) siang.

TB Hasanuddin mengatakan, 14 daf-tar inventarisasi masalah (DIM) dalam

naskah ratifikasi telah disetujui oleh semua fraksi dan semua menteri yang ikut membahas RUU tersebut.

Ia meyakini bahwa industri pertahanan di Turki cukup maju, karena berorientasi dengan dua sisi yaitu Eropa dan Asia. Turki memiliki industri



Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin

dengan teknologi yang sangat canggih. “Itu merupakan kesempatan bagi kita bisa bekerja sama di bidang industri menengah, dan industri dengan teknologi yang sangat canggih,” ujar Hasanuddin.

Menteri Pertahanan Purnomo Yugiantoro dalam sambutannya memandang pentingnya ratifikasi dari DPR. Seperti diketahui pada tanggal 29 Juni 2010 pernah ditandatangani persetujuan kerja sama industri pertahanan dengan Republik Turki. “Ini sudah sesuai dengan Undang-undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,” ungkapnya.

pertahanan yang beragam, mulai dari industri menengah, sampai industri

Perjanjian tersebut meliputi penyediaan berbagai fasilitas yang diper-

lukan bagi perkembangan produksi modernisasi bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produksi industri serta jasa pertahanan.

Selain itu, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah, dan teknis partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium penjualan dan pembelian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

“Kerja sama industri pertahanan ini akan tetap mengedepankan penguasaan teknologi militer dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri,” katanya. (Spy), foto : andri/parle/hr.

## Segera Tuntaskan Tenaga Honorer K2

Anggota Komisi II DPR Gamari Sutrisno mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB harus segera menuntaskan persoalan tenaga honorer Katagori 2 (K2).

“Masalah ini sudah sangat berlarut-larut Pak Menteri, dan saya tidak ingin mendiskusikan terus menerus, oleh sebab itu saya sebagai anggota Komisi II DPR mengusulkan kepada Pak Menteri agar persoalan ini segera tuntas,” kata Gamari saat Komisi II DPR Raker dengan Menpan dan RB Azwar Abubakar, di Jakarta, Senin,(30/6).

Ia menambahkan, selain itu perlu ada batas waktu yang jelas kapan tuntasnya, karena ia khawatir kedepannya saat Pemerintahan dan DPR yang baru nanti persoalan ini akan menjadi terbengkalai.

“Oleh sebab itu karena saya melihat ada peluang untuk segera menyelesaikannya, maka peluang inilah yang kami harap bisa dimanfaatkan oleh Menpan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer K2 ini, terutama sesuai dengan yang sudah diamanahkan dalam PP 56 Tahun 2012 sebagai revisi dari PP 48 Tahun 2005,” tegas politis PKS ini.

Dalam rapat kali ini, Gamari menjelaskan, salah satu yang perlu disampaikan ke Menpan bahwa dalam rangka pengangkatan tenaga honorer K2, Menpan harus mengacu pada PP 56 pasal 6a ayat 6 yang berbunyi pengumuman kelulusan ujian tertulis kompetensi dasar dilakukan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Aparatur Negara berdasar nilai hasil ujian yang diolah konsorsium Perguruan Tinggi dan mempertimbangkan pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan.

“Ini perintah PP nya seperti itu, jadi selain nilai hasil ujian



Gamari Sutrisno bersama Anggota Komisi II DPR

yang diolah konsorsium Perguruan Tinggi maka Menpan harus mempertimbangkan pengabdian tenaga honorer yang bersangkutan, saya kira inilah semangat kita untuk turut serta menyelesaikan masalah tenaga honorer yang sudah berlarut-larut ini,” terangnya.

Dalam hal formasi, ujar Gamari, ia melihat formasi masih tersedia, karena berdasarkan hasil tes terhadap tenaga honorer yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013, yang dinyatakan lulus oleh pemerintah sekitar 387 ribu.

“Nah sementara itu kan masih ada formasi pada tahun 2014 sebanyak 10 ribu untuk pusat dan 28 ribu untuk daerah, karena formasi ini masih ada dan tersedia, maka saya menyarankan Pak Menteri, gunakanlah formasi ini untuk menyelesaikan tenaga honorer K2, karena jumlahnya cukup, tapi tentu melalui proses yang adil, objektif dan tidak dzolim, intinya mohon dituntaskan secepat mungkin,” harapnya.



Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan bahwa pemerintah tidak ada niat untuk memperlambat, “Saya satu-satunya Menteri yang membuat program 100 hari terakhir, salah satunya masalah tenaga honorer ini selesai, dan ‘gak’ ada niat memperlambat, namun memanggil manajemennya tidak mudah,” tegasnya.

Raker dengan Menpan dan RB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR

Agun Gunanjar kali ini ditutup dengan menghasilkan 2 kesimpulan, pertama, Komisi II DPR meminta kepada Menteri PAN dan RB dan BKN untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer khususnya yang termasuk dalam Katagori II dengan membuat batas waktu agenda penyelesaiannya secara konkret dan tuntas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2012 serta dilaporkan perkembangannya selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan September

2014.

Kedua, Komisi II DPR mengapresiasi Kementerian PAN dan RB dalam penyelenggaraan proses seleksi KASN dan Pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) serta Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang telah berjalan dan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (nt), foto : naefurodje/parle/hr.

## Komisi VII Berencana Panggil Menko Perekonomian

Terkait kebijakan pemerintah yang melarang seluruh perusahaan yang belum memiliki smelter untuk mengeksport hasil tambangnya (*raw material* atau *core*), Komisi VII DPR berencana akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami bersyukur mendapatkan peta yang nyata setelah 5 bulan sejak tanggal 12 Januari 2014 larangan itu, ternyata kita lihat ada fakta di lapangan, ada karyawan yang dirumahkan, ada penumpukan *concentrate* yang bernilai, harus ada jalan keluarnya. Kami akan segera sampaikan ke kementerian dan segera merencanakan untuk memanggil pihak kementerian untuk melaporkan daripada hasil negosiasi yang dilakukan,” kata Milton Pakpahan, Ketua Tim Kunjungan Lapangan Panja Minerba Komisi VII ke PT. Freeport di Timika, Papua, beberapa waktu lalu.

Milton menegaskan bahwa spiritnya lebih cepat lebih baik kita menyelesaikan masalah ini. Dan ini tidak hanya berlaku untuk PT. Freeport saja tapi berlaku bagi seluruh industri yang sama.

“Kalaupun pemerintah membuat kebijakan, membuka kran larangan itu karena memang pertimbangan banyak hal, pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan korporasi,” ujarnya.

Korporasi ini, kata politisi Partai Demokrat, melibatkan bukan hanya Kementerian Energi dan Sumber Daya



Ketua Tim Kunlap Panja Minerba Komisi VII DPR Milton Pakpahan

Mineral (ESDM), tapi juga Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian.

“Yang kami amati hari-hari ini mereka sedang rapat dibawah Menko Perekonomian, untuk mencari solusi, ada solusi yang saya lihat win-win solusi yang dilakukan, seperti melakukan kebijakan jaminan keseriusan,” Milton menginformasikan.

“Seperti menanamkan investasi uang yang didepositkan. Ini menjadi kesungguhan akan membangun smelter. Artinya ada itikad baik, ada kepastian mereka serius,” tambahnya.

Menurutnya, pemerintah sendiri

akan membuat payung hukum untuk membuka kebijakannya. “Agar *concentrate* ini bisa berjalan, karena bagaimanapun perlu *cashflow*, perlu perputaran, sementara kita suruh bangun smelter”, imbuhnya.

Dijelaskan Milton, DPR paham jika di stop ekspor, bagaimana mereka (perusahaan tambang) akan jalan, bagaimana membangun bisnis ini. Proses negosiasi sedang berjalan, Milton mengharapkan segera selesai.

“Kami berharap dan kami dalam waktu dekat setelah pulang membawa aspirasi yang kami dapat khususnya dari masyarakat Timika (*Papuan Brith-erhood*) dengan berbagai konsekuensi apabila ini tidak dibuka ke Kementerian,” papar politisi Daerah Pemilihan Papua.

“Kami akan undang untuk duduk bersama dengan Dewan khususnya Komisi VII untuk mendesak terutama untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebaiknya, baik buat pemerintah, baik buat pemerintah daerah, baik buat investor,” tambahnya.

Investor perlu kepastian hukum, keamanan perlu jaminan investasi dan lain sebagainya. Semua diperlukan agar bisa berjalan kembali, dirinya sangat mendukung agar rakyat tidak dirugikan. Milton sepakat, ada waktu masa seperti saat ini, tetapi jangan terlalu lama. (sc), foto : suciati/parle/hr.

## RUU Keswa Siap Dibawa ke Paripurna

Komisi IX dan Kementerian Kesehatan menyepakati Rancangan Undang-undang Kesehatan Jiwa dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna dimintakan persetujuan untuk disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini menjadi kesimpulan dalam raker antara Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Senin (30/06).

Sebelumnya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Berbagai harapan dan masukan diberikan oleh fraksi terhadap RUU inisiatif DPR ini, dan menyetujui RUU Keswa ini untuk dibahas di Sidang Paripurna. RUU Keswa terdiri dari 10 Bab dan 91 Pasal.

Pandangan mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Anggota Komisi IX Wirianingsih meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar lebih serius dalam memprioritaskan pembangunan kesehatan jiwa, baik dalam dukungan anggaran maupun sistem.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus memenuhi rasio jumlah SDM kesehatan jiwa dengan memperhatikan pendistribusiannya secara proporsional. Pemerintah juga harus secara masif menyosialisasikan kepada masyarakat terkait larangan pemasangan kepada ODGJ,” jelas Wi-



Anggota Komisi IX DPR Wirianingsih

win, sapaan akrab Wirianingsih.

Sementara itu, pandangan mini fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan penanganan kesehatan jiwa tidak terlepas dari ketersediaan dukungan infrastruktur, baik rumah sakit yang memiliki penanganan kesehatan jiwa maupun keberadaan dokter yang memenuhi standar.

“Dari sekitar 700 rumah sakit umum di seluruh Indonesia hanya 97 RSU yang memberikan penanganan terhadap kesehatan jiwa. Di lain pihak, 9 ribu Puskesmas hanya 1.235 Puskesmas yang memberikan pelayanan terkait,” jelas Anggota Komisi IX Hang Ali Saputra Ayah Pahan (F-PAN).

Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksinya, Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno mengetuk palu sebagai tanda RUU Keswa disepakati untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II.

“Selanjutnya, RUU Kesehatan Jiwa dapat dilanjutkan Pembicaraan di Tingkat II,” ucap Politisi Gerindra ini.

Menanggapi persetujuan ini, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengaku senang dengan dibawanya RUU Keswa ke Sidang Paripurna. Ia memberikan apresiasinya kepada seluruh tim yang telah bekerjasama dalam penyusunan RUU Keswa ini.

“Pemerintah juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap panitia kerja dan secara khusus kepada mantan Ketua Panja RUU Nova Riyanti Yusuf atas kerja kerasnya, sehingga RUU Keswa dapat selesai sesuai jadwal yang disepakati antara pemerintah dan Komisi IX,” jelas Nafsiah.

Ia juga berharap dalam RUU Keswa ini dapat menjamin setiap orang mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan yang sehat, bebas dari ketakutan tekanan dan faktor lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. (sf), foto naefurodjie/parle/hr.

## Vonis Akil Pelajaran Mahal Bagi Pejabat Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf menyebut vonis seumur hidup yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar sebagai pelajaran. Ia berharap ganjaran tersebut bisa memberi efek jera kepada siapapun terutama pejabat negara.

“Saya rasa ini pelajaran yang mahal sekali bagi siapa saja, terutama bagi pejabat negara. Keputusan hakim se-

harusnya bisa memberikan efek jera karena melewati sisa hidup di penjara tentu pilihan yang menakutkan,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/7/14).

Baginya kesalahan yang dilakukan memang termasuk kategori berat, korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat negara yang mendapat amanah mengawal konstitusi. Sebagai pimpinan komisi hukum di DPR ia berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali.



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf



Dalam keputusannya Majelis Hakim Tipikor mengatakan ada hal yang memberatkan sehingga putusan maksimal diberikan diantaranya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai Ketua MK. Perbuatan tersebut juga telah meruntuhkan wibawa MK dan diperlukan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan itu.

Akil dinyatakan terbukti menerima suap sengketa Pilkada diantaranya di Kabupaten Gunung Mas Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah Rp 3 miliar, Lebak Banten Rp 1 miliar, Empat Lawang Rp 10 miliar dan US\$500.000 dan Pilkada Kota Palembang Rp 3 miliar. Ia juga dinyatakan terbukti melakukan pencucian uang saat menjadi hakim konstitusi senilai Rp 161,080 miliar.

Menanggapi vonis tersebut, mantan politisi yang pernah menjadi anggota legislatif ini mengatakan hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Ia memutuskan akan mengajukan upaya banding. “Sampai ke Tuhan akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding,” demikian Akil (iky)/foto:iwan armanias/parle.

## DPR Bertekad Selesaikan RUU Minuman Beralkohol

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Dimiyati Natakusumah mengatakan bahwa DPR bertekad untuk segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

“UU Larangan Minuman Beralkohol itu penting, mengingat dampak dari minuman keras tersebut sangat merugikan masyarakat,” tegas Dimiyati saat forum diskusi mengenai “Pengendalian Miras” di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/7).

Ia menambahkan, banyak peristiwa kriminal yang terjadi di tengah masyarakat, juga dampak rusaknya pemikiran dan syaraf manusia, maka minuman keras itu perlu diatur melalui pengendaliannya ditengah masyarakat, “Tidak boleh dijual ditempat umum, hanya ditempat tertentu saja,” tegasnya.

Selama ini, lanjutnya menjelaskan, ketentuan yang mengatur dan mengendalikan minuman keras pada orang dewasa ini baru ada pada tataran Perda di masing-masing daerah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Karena itu dengan adanya RUU ini nantinya, pemerintah



Suasana Dialog Forum Legislasi

daerah mempunyai payung hukum yang lebih kuat lagi, sehingga akan lebih tegas dalam mengendalikan peredaran Miras, pada prinsipnya agar diatur sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” terang politisi dari PPP ini. (nt)/foto:andri/parle/iw.

## Komisi VII Minta PT Freeport Patuhi UU Minerba

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sudah berjalan lima tahun, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari PT. Freeport Indonesia untuk membangun smelter sebagai salah satu dari enam point yang harus dipatuhi dalam UU Minerba tersebut.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan Panitia Kerja Minerba Komisi VII DPR RI, Milton Pakpahan usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Timika di Papua, Kamis malam lalu (26/6).

“Sebenarnya UU ini sudah berjalan sejak 2009, dikasih waktu lima tahun untuk membangun smelter, setidaknya



Wakil Ketua Komisi VII DPR berdialog dengan jajaran Pemda Timika

membangun komitmen untuk membangun *smelter* bukan harus selesai saat ini tapi sudah ada proposal, konsep, *visibility study* atau sudah ada kegiatan mengarah kesana,” kata Milton yang juga Ketua Komisi VII.

Ditegaskan Milton, bahwa UU harus dijalankan, ini amanat konstitusi. Paling tidak ada keseriusan dari PT. Freeport.

Kita semua menyadari, tegas Milton, bahwa UU ini akan sangat besar manfaat bagi bangsa dan negara ini. Namun sampai sekian puluh tahun, pemerintah kita hanya mendapatkan sedikit bagian. “Dengan naiknya royalti akan lebih baik. Dengan membangun *smelter* tentunya ada ribuan tenaga kerja baru, ada *multiplier effect* dari

pada suatu sistem, ada pendukung-pendukung yang terus hidup meningkatkan pendapatan bagi negara maupun bagi masyarakat,” papar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lalu, dengan adanya penciptaan wilayah, lanjut Milton, ada kesempatan lain untuk pengusaha-pengusaha lain untuk bekerja di bidang yang sama.

Ditegaskan Milton, bahwa DPR mengharapkan dukungan masyarakat bahwa UU ini baik bagi kita semua disaat Indonesia saat ini sedang berat, karena industri minyak kita sedang turun. “Kita tahu bahwa salah satu pilar *income revenue* adalah minyak, pajak dan hibah. *Lifting* dan sumber daya alam PNBnya kecil,” ujarnya.

Diterangkan Milton, Indonesia harus mentransformasi penghasilan. Diharapkan dengan UU 4/2009 ini pendapatan Indonesia meningkat, pendapatan negara melalui royalti, pajak industri yang ada akan bertambah. Inilah yang diharapkan bersama, sehingga pembangunan akan jauh lebih cepat daripada yang didapatkan saat ini.

6 point dari UU Minerba antara lain: divestasi saham, pemanfaatan produk dalam negeri/tenaga kerja lokal, royalti, perubahan dari ijin usaha pertambangan menjadi ijin pertambangan, penciptaan wilayah, dan *smelter*. (sc), foto : *suciati/parle/hr*.

## Tiongkok Ingin Tingkatkan Investasi



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xie Feng

Republik Rakyat Tiongkok berkomitmen akan meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Hubungan kedua negara yang sangat baik, membuat keduanya saling memberi harapan dan keuntungan ekonomi.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan Duta Besar Tiongkok yang baru untuk Indonesia Xie Feng, di ruang kerja Ketua DPR, Senin (30/6).

“Saya sampaikan hubungan dengan Tiongkok pada posisi yang sangat baik.

Tidak ada hal-hal khusus yang mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok, baik dalam hubungan antar-pemerintah, parlemen, maupun antar-rakyat Indonesia dan Tiongkok,” kata Marzuki.

Pemerintah Tiongkok seperti disampaikan Xie Feng, sangat berminat untuk berinvestasi di Indonesia sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara. “Tiongkok sudah menyampaikan bahwa ada keinginan untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Meningkatnya investasi ini dapat men-

dorong ekspor Indonesia ke Tiongkok. Dengan demikian akan mengurangi defisit perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok,” jelas Marzuki.

Kerja sama di bidang investasi ini diharapkan bisa saling memberi nilai tambah, baik untuk produk dagang maupun bagi sumber daya yang selama ini belum dikelola dengan maksimal. Dalam kesempatan tersebut, dibicarakan pula tentang kerja sama di bidang olahraga terutama tenis meja. Seperti diketahui, Tiongkok sangat merajai di cabang olahraga yang satu ini.

Marzuki berharap, Tiongkok bisa mendatangkan pelatih profesionalnya ke Indonesia untuk memajukan cabang tenis meja. Secara kebetulan, Marzuki adalah Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Indonesia. Sebaliknya, bagi para atlet tenis meja Indonesia bisa diberi kesempatan belajar ke Tiongkok.

“Kita berharap ada pelatih dari Tiongkok untuk hadir ke Indonesia memberikan pelatihan kepada para pelatih Indonesia. Dan kepada para atlet diberikan kesempatan untuk latihan di Tiongkok. Mudah-mudahan dari kerja sama ini akan meningkatkan prestasi atlet tenis meja Indonesia di masa yang akan datang,” harap Marzuki. (mh), foto : *andri/parle/hr*.

## Komisi VII Tinjau PT. Vale Indonesia Tbk

Panitia Kerja Mineral dan Batubara (Panja Minerba) Komisi VII DPR RI meninjau lokasi pertambangan nikel PT. Vale Indonesia di Sorowako, Makassar, untuk melihat progres dari renegotiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pihak PT. Vale Indonesia.

“Komisi VII menghargai proses negosiasi yang boleh dibidang mulus dibandingkan industri serupa di tempat lain, seperti Newmont maupun Freeport yang hingga saat ini belum ada titik temu,” kata Satya Yudha, saat memimpin kunjungan tersebut, Rabu (26/6).

Satya Yudha menjelaskan bahwa ada 6 poin strategis hasil renegotiasi, mulai dari penciptaan luas lahan, penggunaan lokal konten, reklamasi, pengembangan masyarakat, menaikkan *royalty*, dan melakukan divestasi. Menurutnya 6 poin tersebut telah berhasil diselesaikan antara Vale dengan pihak pemerintah.

Namun demikian, masih ada tugas atau beban dari pemerintah agar apa yang telah sepakati itu bisa menjadi langkah-langkah yang dikehendaki, termasuk apabila nanti telah disepakati perjanjian tersebut maka proses divestasi sudah bisa dijalankan 20% bisa dijual ke publik dan 20% lagi kepada pemerintah Indonesia. “Ada 40% yang di divestasi,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, tentunya pemerintah harus menyiapkan baik itu dari sisi pendanaan ataupun industri-industri yang berbasis sama, industri mineral milik Negara. “Jangan sampai kesempatan divestasi sudah diberikan tetapi tidak satupun industri atau pemerintah pusat mengambil over,” jelasnya.



Tim Panja Minerba meninjau lokasi tambang PT Vale Indonesia

Dengan demikian, menurut Satya, menunda divestasi berarti pendapatan negara itu menjadi ikut tertunda. Jadi lebih kepada bagaimana pemerintah mengantisipasi dari seluruh proses renegotiasi yang telah diselesaikan.

Selain itu, katanya yang penting bagi Vale sendiri adalah meningkatkan kesadaran mereka terhadap aspek lingkungan hidup karena mereka propertinya masih berwarna biru belum hijau atau bahkan emas yang merupakan proses penilaian yang lebih tinggi.

“Lantas yang tidak kalah penting adalah pengembangan dari sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan dari yang ada sekarang,” imbuhnya. (as) foto: agung sulistiono/parle

## Komisi V DPR Dukung Pembangunan Infrastruktur di Gorontalo

Dalam pembangunan infrastruktur di Gorontalo, Komisi V DPR akan terus mengawal dan tetap mendukungnya termasuk pelebaran Jalan Beringin-Rambutan-Palma sebagai penunjang akses Terminal Duingi. Selain itu penataan Simpang Jalan H.B. Yasin-Nani Warta Bone (Hulonthalo Indah) dan Simpang Jl. Andalus-Pangeran Hidayat, serta rencana Pembangunan Jembatan Jalan Mayor Dullah – Jalan BotuliyoDU (MADU).

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI, Roem Kono dari Fraksi Partai Golkar kepada wartawan usai tim kunker melakukan kunjungan langsung ke lokasi Rencana Pembangunan Jembatan MADU, di

Pelabuhan Gorontalo, belum lama ini.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kebutuhan infrastruktur menjadi penting, karena keuangan daerah itu tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur, sehingga harus dibantu pemerintah pusat.

“Komisi V DPR RI fokus dan konsentrasi untuk bisa memperjuangkan supaya anggaran-anggaran pembangunan infrastruktur itu tetap meningkat di tahun-tahun akan datang,” jelasnya.

Dalam penataan infrastruktur, jelas Roem Kono, pemerintah pusat harus betul-betul bisa membantu daerah, karena keuangan daerah lebih banyak



Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR Roem Kono

terserap oleh anggaran-anggaran lain. Terutama anggaran belanja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang begitu besar sehingga untuk pembangunan perbaikan jalan dan segala macam itu menjadi tidak maksimal, ujarnya. (iw) foto: iwan armanias/parle.

# BPJS Belum Mampu Layani Penderita ODGJ

Umumnya, BPJS hanya melayani pasien maksimal hingga 47 hari. Namun, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) butuh perawatan seumur hidupnya. Ini yang masih menyulitkan pelayanan BPJS di setiap rumah sakit jiwa (RSJ).

Demikian terungkap dalam pertemuan tim kunjungan kerja Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Selatan di RSJ Sambang Lihum, Banjarbaru, Kalsel, Kamis (26/6).

Para penderita ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, biasanya masih ditolak oleh keluarga dan masyarakatnya, karena dikhawatirkan kambuh kembali. Akhirnya, terpaksa RSJ menampung semua penderita ODGJ tersebut.

Di hadapan tim Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX, Gubernur Kalsel Rudy Arifin memberi masukan agar alokasi dana untuk RSJ diperhatikan serius dalam rumusan RUU



Pertemuan Tim Komisi IX DPR dengan jajaran Pemprov. Kalsel

Kesehatan Jiwa. Menurutnya, butuh dana besar untuk menyembuhkan dan merehabilitasi penderita ODGJ. Pemda kerap kewalahan dengan anggaran yang minim untuk RSJ.

Direktur RSJ Sambang Lihum Ida Bagus Gede Dharma Putra, mengungkap-

kan, selain membiayai hidup pasca-terapi, RSJ juga kerap membiayai hingga melakukan pemakaman bagi para penderita ODGJ yang wafat. Selama ini penderita ODGJ selalu diasingkan dan dimarjinalkan. Disinilah butuh perhatian serius pemerintah dan DPR. (mh), foto: m. husein/parle/hr.

## Komisi VI DPR Himpun Masukan Revisi UU BUMN

Komisi VI DPR RI mulai pada tahapan untuk adanya revisi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003. Dalam kaitan ini, secara spesifik ingin melihat bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN yang terkait dengan kekayaan negara, termasuk juga aset-aset yang ada di BUMN, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR dalam rangka pengawasan kepada tiga BUMN, yaitu PT. Semen Tonasa, PTPN XIV, dan PT. Sang Hyang Seri. Kunjungan Kerja (Kunker) ini dilakukan sebagai tugas kontribusi DPR RI terkait dengan prosedural pelaksanaan undang-undang, sejauh mana korporasi ini telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengawasan

prosedural di dalam aturan-aturan yang berlaku di ranah BUMN.

Ketua Tim Komisi VI DPR Yusus Kuswandana dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan, tujuan dari Kunker ini untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban pemerintah di bidang industri, perdagangan, investasi, BUMN serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). "Termasuk sejauh mana nilai-nilai kemajuan baik dari deviden yang dicapai di perusahaan tersebut," ujar Yusus saat ditemui Parle, di Makassar, baru-baru ini.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dari DPR RI. Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauhmana pelaksanaan undang-undang berjalan dengan baik,



Ketua Tim Komisi VI DPR Yusus Kuswandana

agar tidak tumpang-tindih dengan undang-undang lain. Tim Komisi VI



DPR RI selanjutnya mengadakan rapat bersama Deputi dan Kementerian BUMN sebagai pembina.

“Kunker ini diharapkan bisa mem-

peroleh informasi secara langsung tentang perkembangan kinerja perusahaan dan anak perusahaan serta rencana-rencana strategis ke depan. Selain itu juga ingin mengetahui ken-

dala-kendala yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing BUMN dalam menjalankan fungsinya,” harap Yusus. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## BAKN Telaah Kerugian Negara di Kementerian dan Lembaga

Hasil penelaahan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara yang meliputi hampir di semua Kementerian dan Lembaga. Hal tersebut diungkapkan Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso dalam laporan yang dibacakannya pada Sidang Paripurna, Kamis (3/7).

“Hampir di semua Kementerian dan lembaga terjadi kerugian negara. Dan semua itu sejatinya sudah menjadi isu di masyarakat dan berbagai media massa,” ungkap Sumarjati Arjoso.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mencontohkan beberapa kerugian negara yang terjadi. Diantaranya, piutang bukan pajak sebesar 3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima dan mengandung ketidakpastian karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKS. Adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS membuat perhitungan bagi hasil yang tidak pasti sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 2,46 triliun itu

Sumarjati menambahkan, pembayaran PPh Migas tahun 2013 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan menggunakan tarif tax treaty. Hal itu menyebabkan penerimaan negara lebih rendah sebesar 1,78 triliun.

Selama tahun 2013 terdapat keterlambatan penyetoran atau pemindahbukuan penerimaan PPh Migas, bonus produksi dan lain-lain dari rekening Migas ke rekening kas umum negara sebesar Rp 28,86 triliun. Tidak hanya itu, hasil penjualan gas tahun 2013 juga belum dibayarkan oleh wajib bayar kepada negara, yang akhirnya membuat kerugian negara sebesar Rp 2,5 triliun.

“Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp 3,06 triliun belum juga



Ketua BAKN Sumarjati Arjoso menyerahkan Laporan Hasil Penelaahan BAKN kepada Pimpinan DPR

ditelusuri oleh pemerintah sehingga belum disajikan dalam nilai aset Eks Kredit BPPN yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Sumarjati.

Sumarjati menjelaskan, sebenarnya masih ada beberapa kerugian negara lainnya yang menjadi hasil telaahan BAKN DPR RI yang telah dilaporkan pada Pimpinan DPR RI dan seluruh anggota DPR RI dalam rapat paripurna tersebut.

Ia berharap agar hasil telaahan yang telah direkomendasikan tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran sebagai pertimbangan dalam merumuskan UU Pertanggungjawaban Pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2013 dan masing-masing komisi untuk pembahasan APBN Tahun Anggaran 2015, serta pimpinan fraksi dapat menggunakan hasil telaahan BAKN DPR RI sebagai bahan masukan dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2013 serta bahan masukan dalam penetapan UU APBN Tahun 2015. (Ayu) foto: naefurodjie/parle

## Komisi V DPR RI Dukung Revitalisasi Danau Limboto

Komisi V DPR RI mendukung pembangunan Danau Limboto menjadi suatu danau besar yang akan menjadi pusat penampungan air, tidak hanya sekedar embung. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Roem Konodari Fraksi Partai Golkar, baru-baru ini.

“Tujuan kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Gorontalo kali ini adalah untuk melihat kondisi Danau Limboto dan penanggulangan banjir,” ujarnya.

Menurut Politisi Partai Golkar, masalah revitalisasi Danau



Tim Komisi V DPR saat meninjau Danau Limboto, Gorontalo

Limboto dan penanggulangan banjir di Provinsi Gorontalo harus ditangani secara serius. Tinggal bagaimana cara menata semua aliran-aliran air yang sudah dipresentasikan oleh Balai Sungai sebelumnya.

“Maksimal dalam 5 tahun ini kita sudah harus bisa membuat suatu tata ruang yang dapat menanggulangi banjir, sehingga tidak akan ada lagi ancaman banjir,” tegas Roem Kono.

Senada dengan Roem Kono, anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadoes Soemarwanto mengungkapkan perlunya revitalisasi Danau Limboto. Hal tersebut mengingat disekitarnya lebih banyak tadah hujan dibanding sistem

pengairannya. Padahal itu bisa dipakai sebagai cadangan air baku juga di tengah kenyataan bahwa PDAM belum masuk daerah tersebut. Oleh karenanya ia mengusulkan permukaan danaunya dinaikkan.

“Sebelumnya PU (Kementerian Pekerjaan Umum) merencanakan menaikkan permukaan 1 meter. Kalau 1 meter dikali 30 hektar sudah 30 juta kibik. Kalau itu dinaikkan lagi tidak apa-apa. Itu penting untuk persiapan air baku termasuk untuk pengairan dan air minum,” ujar Dadoes.

Sementara itu, Wakil Bupati Gorontalo, Tony S. Yunus sangat mengapresiasi dukung penuh Komisi V DPR RI atas rencana revitalisasi Danau Limboto. Karena menurutnya revitalisasi Danau Limboto ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah pusat dalam rangka penyelamatan beberapa danau-danau besar di Indonesia.

Kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur ke Provinsi Gorontalo terdiri atas 9 orang, dipimpin Roem Kono disertai sejumlah anggota lintas fraksi, yakni Nova Iriansyah, Sonny Waplau, dan Agung Budi Santoso dari Fraksi Partai Demokrat; Bambang Sutrisno dan Ibnu Munzir dari Fraksi Partai Golkar; Dadoes Soemarwanto dari Fraksi PDI Perjuangan; Muhammad Arwani Thomafi dari Fraksi PPP; dan Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai Gerindra. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

## Saatnya Dibuka Jenjang Pendidikan Tinggi Geothermal

Menghadapi pemanfaatan energi geothermal (panas bumi) di masa yang akan datang, sudah saatnya dibuka jenjang pendidikan tinggi baik Strata (S1) atau Diploma (D3) geothermal. Prospek pemanfaatan energi panas bumi kedepan cukup besar sehubungan dengan subsidi migas yang membengkak dan cadangan yang makin menipis, sehingga harus beralih ke panas bumi.

Demikian mengemuka saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR dipimpin Jamaludin Karim mengadakan kunjungan ke PLTP Lahendong 1 dan 2 di Sulut, Jumat pekan lalu.

Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energi Hadi Karyono mengakui dalam hal penyiapan sumber daya manusia (SDM) memang tenaga yang disiapkan oleh kalangan pergu-



Tim Komisi VII DPR meninjau PLTP Lahendong Sulut

ruan tinggi tidak banyak. Pasalnya pendidikan khusus di bidang geothermal terutama di level operator tidak ada sehingga menjadi hambatan bagi operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

“Harapan kita ke depan kalau di minyak ada akademi migas (AKA Migas), mudah-mudahan ke depan ada akademi geothermal. Ini perlu support dari Kementerian ESDM,” katanya.

Dijelaskan pula, ketika masih di Migas secara besar-besaran dilakukan upaya untuk membesarkan AKA Migas di Cepu. Namun dalam perkembangannya SDM yang ada hanya itu-itulah saja dan tidak berkembang. Bahkan untuk mengembangkan geothermal sendiri sangat luar biasa, terutama pada level operator. “Pendidikan formal kita tidak ada yang khusus geothermal. Kita berharap ada AKA Migas tapi khusus bidang geothermal,” katanya lagi.

Menurut Hadi, Pertamina sudah bekerja sama dengan Undip Semarang,

dengan harapan ada pendidikan D 3 atau S1 Geothermal, namun kelihatannya masih jauh. Akibatnya, sekarang orang yang bekerja di PLTP masih itu-itu saja sehingga banyak pegawai Geothermal yang pensiun, lalu ditarik kembali.

Menanggapi hal ini Ketua Tim Komisi VII Jamaludin Karim mendukung dibukanya jenjang pendidikan tinggi geothermal. Prospek ke depan sangat baik sehingga perlu diinformasikan kepada anak-anak kita. “SDM untuk PLTP perlu

diisi oleh anak-anak kita. Ini lahan yang terbuka luas sehingga potensinya bisa dimanfaatkan sekaligus dapat menyalurkan tenaga kerja terampil anak-anak kita sendiri,” ia menambahkan. (mp), foto: mastur prantono/parle/hr.

## Soal Blok Kampar, Komisi VII DPR Kunjungi Pekanbaru

Terkait keinginan Pemerintah Daerah untuk mengelola Blok Kampar pasca berakhirnya kontrak PT Medco, Komisi VII DPR mengunjungi Pekanbaru untuk menyerap dan memfasilitasi keinginan masyarakat terkait Blok Kampar.

“Kedatangan Komisi VII DPR yaitu ingin merespon permintaan masyarakat pelalawan dan masyarakat riau yang telah tiga kali mengunjungi Jakarta untuk membicarakan Blok Kampar,” ujar anggota DPR Sukarnotomo saat mengadakan RDP dengan Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, dan perwakilan Masyarakat Riau di Auditorium Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau baru-baru ini.

Menurutnya, kunjungan ini bertujuan ingin mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dan sebagai anggota DPR yang memiliki tiga fungsi pengawasan, *budgeting*, dan legislasi. “Kita ingin tahu aspirasi masyarakat pelalawan yang ingin pengambil alihan blok Kampar dan yang melatar belakangnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, berdasarkan PP no.35 2004 maka kontrak Migas yang habis maka secara prioritas dikembalikan kepada Pemerintah RI dan diserahkan kepada Perusahaan Indonesia. “Kami juga ingin tahu apa sebenarnya keinginan masyarakat Pelalawan pasalnya ini sudah sudah terang benderang mereka ingin mengambil alih dan kesanggupan untuk mengelolanya,” paparnya.



Tim Komisi VII DPR berdialog dengan Wakil Gubernur Riau

Dia menambahkan, Komisi VII DPR juga mengundang SKK Migas, Pihak Medco untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait Blok Kampar. “Ini memang masih belum jelas padahal masa kontrak sudah habis apakah disetop, perpanjangan atau dikembalikan kepada Indonesia,” tandasnya.

Seperti diketahui, PT Medco telah menjalani kontrak perpanjangan kedua hingga Desember 2014 mendatang. Selain itu, Blok Kampar masih menjadi sumber penghasil minyak Riau, sementara ladang Blok Kampar terletak diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, dan menghasilkan 1.800 barel per hari. (Sugeng Irianto)

## Komisi IX Apresiasi RSJ Sambang Lihum, Kalsel

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) telah memberdayakan puluhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah sembuh, untuk dididik menjadi pelaku usaha kecil.

Ini yang menarik perhatian delegasi tim kunjungan kerja, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kesehatan Jiwa, Komisi IX DPR RI, saat berdialog dengan Gubernur Kalsel dan Direktur RSJ Sambang Lihum, minggu lalu.

Kenyataan ini telah memulihkan kepercayaan diri para mantan penghuni RSJ itu untuk menjalani kehidupan normalnya kembali. Sebuah upaya dari RSJ Sambang Lihum yang mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR.

Ketua Tim Kunker Komisi IX yang berkunjung ke RSJ Sambang Lihum dipimpin Danajani H. Mahdi (F-PD), diidampingi anggota lainnya, Dina A. Syahroza (F-PD), Siti Mufattahah (F-PD), Riyani Sudirman (F-PG), Wirianing-

sih (F- PKS), Ansory Siregar (F- PKS), dan Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN).

Selain layanan kesehatan jiwa, kesejahteraan sosial para penderita ODGJ ternyata perlu mendapat perhatian pula dalam rumusan RUU Kesehatan Jiwa yang sedang dibahas Komisi IX DPR. Direktur RSJ Sambang Lihum Ida Bagus Gede Dharma Putra, di hadapan Komisi IX menjelaskan, karena banyak keluarga yang tak mau lagi menerima ODGJ yang sudah dinyatakan sembuh



Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR menerima cinderamata dari eks penderita gangguan jiwa

secara medis, akhirnya dipikirkanlah ODGJ. bagaimana memberdayakan para

Beberapa penghuni ODGJ yang sudah sembuh itu kemudian diberikan pelatihan wirausaha agar kelak mereka bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan hidupnya lagi pada orang lain. Dinas sosial di Kalsel juga belum sepenuhnya bisa menampung mereka. Ketika para penderita ODGJ dinyatakan sembuh, rehabilitasi lanjutan sebenarnya berada di dinas sosial setempat.

Dengan gagasan yang seponatan ini, kemudian mereka diberi pelatihan membuka warung makan. Selama ini, lanjut Dharma, RSJ menanggung penuh biaya hidup para penderita ODGJ yang sudah sembuh itu. Di sini-lah, perhatian Komisi IX dalam melihat kenyataan hidup para penderita ODGJ, untuk kemudian merumuskan dalam pasal tertentu pada RUU Kesehatan Jiwa yang sedang disusun tersebut. (mh), foto : m. husien/parle/hr.

## Soal Kesehatan Jiwa, DPR Apresiasi Pemkot Solo

Kunjungan Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR ke Solo dalam rangka mencari masukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Jiwa. Sebab, DPR beranggapan pemerintah kota (pemkot) Solo dianggap sangat memperhatikan penanganan kesehatan jiwa.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kesehatan Jiwa (Keswa), Irgan Chairul Mahfiz, mengakui Pemkot Solo sangat memperhatikan penanganan kesehatan jiwa. "Kalau kita lihat Pemkot Solo ini kan sudah punya tim pelaksana kesehatan jiwa sampai tingkat kelurahan. Bahkan, kota ini sudah tidak ada orang yang dipasung atau berkeliaran di tengah jalan. Melihat hal-hal semacam itu, saya kira sangat penting untuk masukkan kami," ujar Irgan kepada wartawan di sela kunjungannya ke Griya PMI Peduli, Solo, Kamis (26/6).

Selain itu, Irgan juga mengapresiasi program yang dijalankan Griya PMI Peduli Solo. Menurutnya sudah jarang lembaga non pemerintah yang masih peduli dengan nasib orang yang mengalami gangguan jiwa.

"Kalau kita lihat sekarang ini orang lebih suka dengan kegiatan yang terpublikasi secara besar dan hebat. Kalau program seperti ini kan senyap, bahkan orang kurang memperhatikan, tapi PMI dengan keterbatasannya justru masih peduli dengan mereka," ujarnya.

Dalam kunjungan ke Griya PMI Peduli Solo, selain berbincang dengan pengurus PMI, Panja Komisi IX DPR juga melihat langsung kondisi dan tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan bagi penderita kesehatan jiwa.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz bersama rombongan saat mengunjungi Griya PMI Peduli, Solo

Ditempat yang sama, salah satu pengurus Griya PMI Peduli Solo Sumilir Wijayanti berharap dengan dibahasnya RUU Kesehatan Jiwa ini, dapat menjadi dasar hukum yang bisa membawa angin segar dalam membangun kemitraan dan mobilisasi potensi, untuk berhubungan dengan pihak lain dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sebelumnya dalam pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Kota Surakarta, Wakil Walikota Surakarta Ahmad Pur-

nomo menjelaskan bahwa demi memperhatikan kesehatan jiwa, pemerintah Surakarta atas dasar keputusan Walikota Surakarta, No. 441.3.05/91-A/1/ 2013 telah membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat Kota Surakarta.

Tim ini bertugas, pertama, melaksanakan koordinasi lintas sektoral terhadap kesehatan jiwa masyarakat, kedua,

melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat Kota Surakarta yang optimal. Ketiga, melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi, serta keempat, melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Walikota Surakarta. (nt)/foto:nita/parle/iw.

## Komisi III Setujui Anggaran Seragam Polwan Berjilbab



Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf berdialog sebelum rapat

Komisi III DPR RI menyetujui anggaran untuk pengadaan seragam anggota Polwan yang ingin mengenakan jilbab pada saat melaksanakan tugas. Keputusan itu tertuang dalam RAPBN 2015 dan akan menjadi bagian dari mata anggaran sarana prasarana aparat Polri.

“Kalau dulu pernah dipermasalahkan soal anggaran yang tidak ada, sekarang pada RAPBN 2015 sudah kita sepakati. Sekarang bola ditangan Mabes Polri. Kita tunggu realisasi penggunaan jilbab melalui SK Peraturan Kapolri,” kata Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf saat memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/14).

Ia menyebut dalam rapat kerja sebelumnya dengan Kapolri pada waktu

itu Jenderal Timur Pradopo telah ditampilkan 62 contoh jilbab usulan sejumlah designer. Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahan paparan dalam rapat itu seharusnya sudah menjadi dokumen resmi negara dan tinggal ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Pol. Sutarman.

Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Taslim mempertanyakan kenapa Kapolri kembali membuat Surat Perintah - Sprint terkait jilbab pada tahun ini padahal sudah pernah mengeluarkannya pada tahun 2013 lalu. “Apa beda Sprint no.1164 26 Juni 2013 dengan Sprint no.1063 17 Juni 2014 dan sejauh ini bagaimana perkembangan pembahasannya?” tanyanya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda menyampaik-

kan dukungan dan meminta penjelasan terkait model jilbab yang akan digunakan oleh Polwan. Ia menyebut referensi jilbab dari sejumlah negara Eropa yang pernah dikunjunginya patut menjadi catatan.

“Saya dengar dulu pernah ada tim khusus yang ingin membuat *design*-nya seperti apa. Saya rasa kita perlu bandingkan dengan negara lain, juga dengan Polwan di Eropa, yang saya tahu di Inggris warnanya hitam sebagian ada yang di rancang tahan api,” ujar dia.

Dalam penjelasannya Wakapolri Komjen Pol. Badrotin Haiti menjelaskan munculnya Sprint no.1063 2014 berkaitan dengan rencana Brimob untuk memiliki seragam model baru. Kapolri kemudian memerintahkan pembahasannya disatukan dengan proses penyiapan seragam bagi Polwan yang ingin mengenakan jilbab.

Dalam pertemuan tersebut ia juga memperkenalkan salah satu anggota rombongannya yang menjadi model Polwan dengan seragam berjilbab. Ia berharap dalam waktu tidak lama lagi Peraturan Kapolri tentang seragam dinas di lingkungan Polri sudah dapat diselesaikan.

“Kalau Peraturan Kapolri belum ada memang belum bisa dilaksanakan, yang pasti anggaran sudah disiapkan pada 2015 nanti. Ada 10546 anggota Polwan muslim kita sedang inventarisir berapa orang yang ingin berjilbab termasuk nantinya PNS Polri juga akan diatur di dalamnya, kalau indexnya sudah kita siapkan,” demikian Wakapolri. (iky/mei)



Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, Presiden Direktur CEPP-UI Chusnul Mar'iyah berdialog dengan Delegasi DPRD Seluruh Indonesia tentang Seruan Pilpres Damai, Rabu (2/7) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.



Komisi IX DPR RI Raker dengan Menteri Kesehatan membahas RUU Kesehatan Jiwa, Senin (30/6) Foto: Iwan Armanias/Parle.



Tim Panja RUU Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR mengunjungi Panti Griya PMI Peduli di Solo dalam rangka mencari masukan RUU Kesehatan Jiwa, Kamis (26/6) Foto: Nita/Parle/Hr.